



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang maha Esa atas petunjuk dan bimbingannya, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 dengan baik.

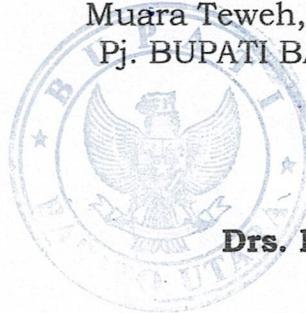
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah dirangkum dalam Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini disusun sesuai dengan sistematika penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) sebagai bentuk pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat yang mencakup gambaran dan penjelasan atas seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Barito Utara dalam kurun waktu tahun 2023, baik dalam hal capaian keberhasilan maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Selanjutnya kami berharap dengan penyampaian RLPPD ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala upaya kita dalam rangka memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Utara.

Muara Teweh, 18. Maret 2023
Pj. BUPATI BARITO UTARA,



Drs. MUHLIS

Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 ini memberikan gambaran dan penjelasan atas seluruh realisasi dari rangkaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Barito Utara kurun waktu tahun 2023, baik dalam hal capaian keberhasilan maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 disusun oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebagai wujud dari keinginan yang kuat dari pemimpin daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas kinerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Penyusunan RLPPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bab IV, Pasal 23 yang menjelaskan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat dan mempublikasikan RLPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan / atau media elektronik.

Ringkasan LPPD menjadi bahan masukan bagi Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu kami sampaikan ringkasan LPPD sebagai berikut :

A. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Berdasarkan perkembangan terkini kondisi perekonomian serta sinkronisasinya dengan penerapan kebijakan pemerintah maka beberapa indikator makro Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2023 mengalami deviasi sesuai dengan rencana jangka menengah yang sudah ditetapkan. Adapun capaian kinerja makro Kabupaten Barito Utara dengan beberapa indikator makro sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN	CAPAIAN	CAPAIAN
		KINERJA 2021	KINERJA 2022	KINERJA 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,64	72,16	72,71
2	Angka Kemiskinan	5,61	5,8	5,35
3	Angka Pengangguran	5,14	4,82	4,85
4	Pertumbuhan Ekonomi	2,82	6,24	5,49
5	Pendapatan Per-Kapita	45.703.809	47.924.307	49.906.763
6	Ketimpangan Pendapatan	0,308	0,301	0,323

1. Indeks Pembangunan Manusia

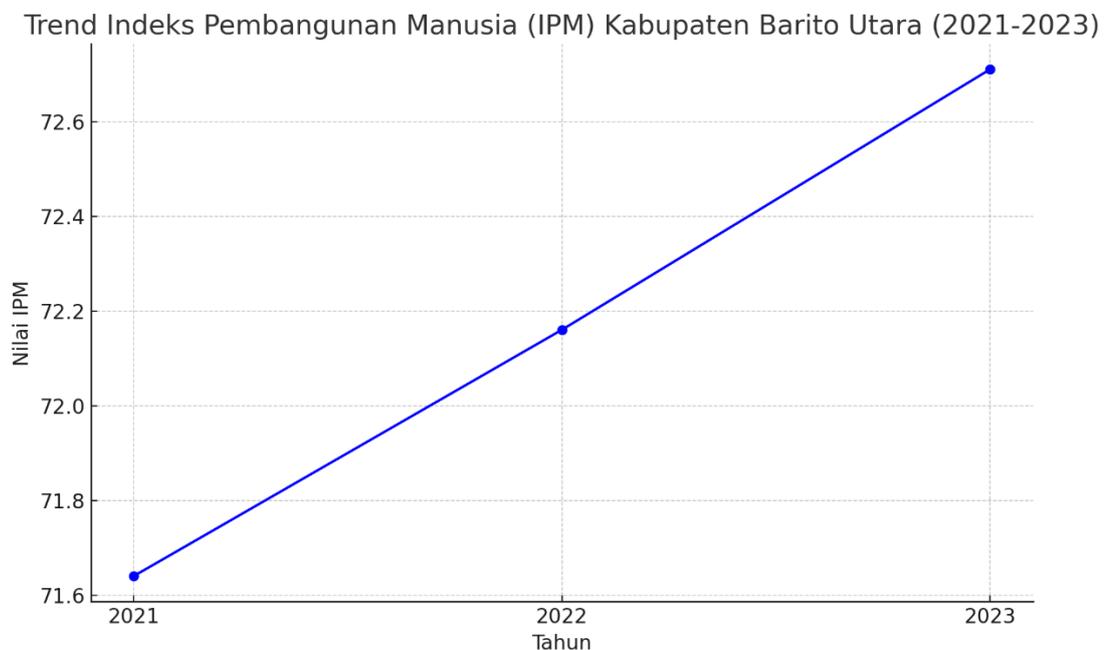
Analisis tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Barito Utara dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan peningkatan bertahap, yang mengindikasikan perbaikan dalam aspek-aspek penting pembangunan manusia seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Berdasarkan data, IPM meningkat dari 71,64 pada tahun 2021 menjadi 72,16 pada tahun 2022, dan kemudian meningkat lebih lanjut menjadi 72,71 pada tahun 2023.

Peningkatan IPM dari 71,64 ke 72,16 antara tahun 2021 dan 2022, mencerminkan peningkatan sebesar 0,73%, menandakan perbaikan yang signifikan dalam kualitas hidup dan akses ke layanan dasar. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan infrastruktur kesehatan, perluasan akses ke pendidikan, dan peningkatan kondisi ekonomi yang memungkinkan akses yang lebih baik ke sumber daya.

Periode berikutnya, dari tahun 2022 ke 2023, melihat pertumbuhan lebih moderat sebesar 0,76% dalam IPM. Walaupun pertumbuhan ini lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini tetap mewakili tren positif dalam pembangunan

manusia. Peningkatan ini mungkin mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta upaya untuk meningkatkan kesempatan ekonomi bagi penduduk.

Peningkatan bertahap dalam IPM di Kabupaten Barito Utara menunjukkan kemajuan dalam pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk memastikan semua orang dapat mencapai potensi penuh mereka dalam kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Namun, untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan IPM, diperlukan investasi berkelanjutan dalam aspek-aspek kritis pembangunan manusia, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi.



Sumber : BPS Kabupaten Barito Utara

Grafik di atas menampilkan tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Barito Utara dari tahun 2021 hingga 2023. Dari grafik, dapat dilihat:

1. Pada tahun 2021, IPM berada pada nilai 71,64.
2. Pada tahun 2022, IPM meningkat menjadi 72,16, menunjukkan peningkatan dalam kualitas hidup dan akses ke layanan dasar.

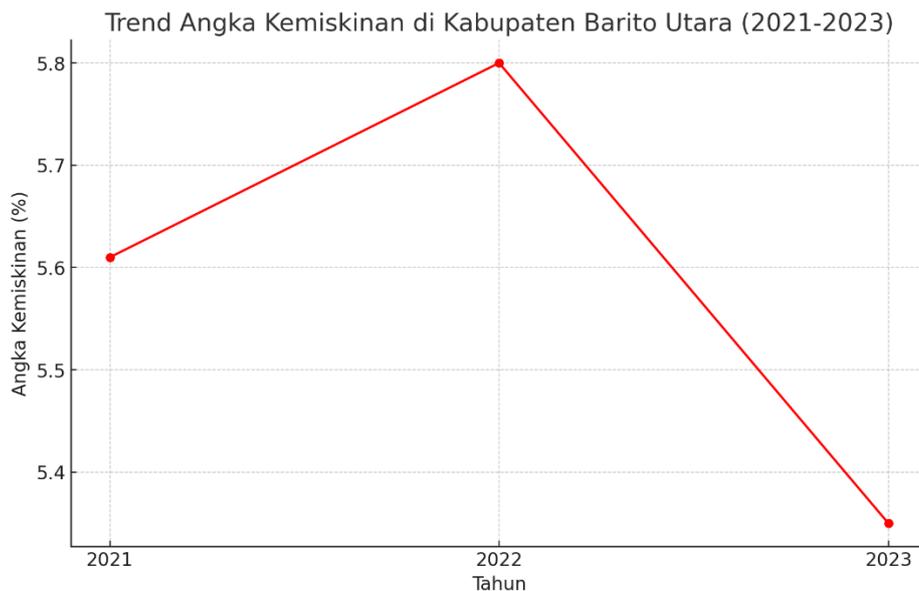
3. Pada tahun 2023, IPM meningkat lebih lanjut menjadi 72,71, menandakan peningkatan berkelanjutan dalam pembangunan manusia di Kabupaten Barito Utara.

2. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Barito Utara menunjukkan sebuah dinamika yang menarik selama periode 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, angka kemiskinan berada pada 5,61%, yang kemudian mengalami sedikit kenaikan menjadi 5,80% pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan menjadi 5,35%. Pergerakan angka kemiskinan ini menggambarkan berbagai aspek dari kondisi ekonomi dan sosial di Kabupaten Barito Utara serta efektivitas dari program-program pengentasan kemiskinan yang dijalankan.

Peningkatan angka kemiskinan dari tahun 2021 ke 2022 bisa jadi mencerminkan berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi, seperti dampak dari situasi eksternal yang tidak terduga atau fluktuasi dalam sektor ekonomi lokal yang dominan. Kenaikan ini mungkin juga mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan atau kesenjangan akses terhadap layanan dasar yang berkualitas, seperti pendidikan dan kesehatan, yang menjadi faktor penting dalam pengentasan kemiskinan.

Namun, penurunan angka kemiskinan pada tahun 2023 menjadi 5,35% menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Barito Utara. Penurunan ini dapat diatributkan kepada berbagai faktor, seperti peningkatan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja melalui investasi di sektor-sektor ekonomi kunci, serta implementasi program bantuan sosial yang efektif yang menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang paling rentan.



Sumber : BPS Kabupaten Barito Utara

Grafik di atas menampilkan trend angka kemiskinan di Kabupaten Barito Utara dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, angka kemiskinan berada pada 5,61%, lalu mengalami peningkatan kecil menjadi 5,80% pada tahun 2022, dan akhirnya menurun menjadi 5,35% pada tahun 2023.

Penurunan angka kemiskinan pada tahun 2023 menunjukkan adanya efektivitas dalam program dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan akses terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang secara keseluruhan berkontribusi pada penurunan kemiskinan.

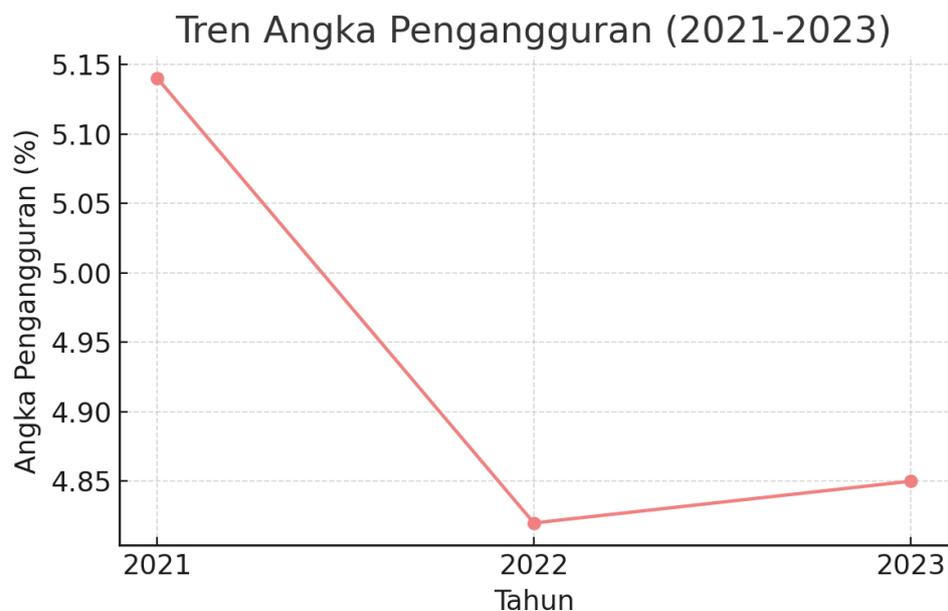
3. Angka Pengangguran

Trend angka pengangguran di Kabupaten Barito Utara selama periode 2021 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang relatif stabil dengan perubahan yang tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2021, angka pengangguran tercatat sebesar 5,14%, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 4,82% pada tahun 2022, menandakan adanya perbaikan dalam pasar kerja. Namun, pada tahun 2023, terjadi sedikit kenaikan menjadi 4,85%, yang mungkin

menunjukkan adanya tantangan baru atau fluktuasi dalam perekonomian yang mempengaruhi pasar kerja.

Penurunan angka pengangguran dari tahun 2021 ke 2022 dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari berbagai inisiatif pemerintah dan sektor swasta dalam menciptakan lapangan kerja, baik melalui investasi dalam infrastruktur, pengembangan industri lokal, atau program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini juga dapat mencerminkan efektivitas program pendidikan dan pelatihan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi angkatan kerja, sehingga memperluas peluang kerja mereka.

Mengatasi pengangguran membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan multi-sektor, yang tidak hanya fokus pada penciptaan lapangan kerja tetapi juga pada peningkatan kualitas angkatan kerja melalui pendidikan dan pelatihan. Selain itu, adaptasi terhadap perubahan teknologi dan tren industri global juga penting untuk memastikan bahwa angkatan kerja di Kabupaten Barito Utara siap menghadapi tuntutan pasar kerja yang terus berubah.



Sumber : BPS Kabupaten Barito Utara

Grafik di atas menampilkan tren angka pengangguran di Kabupaten Barito Utara dari tahun 2021 hingga 2023. Dari grafik, dapat dilihat:

1. Pada tahun 2021, angka pengangguran berada pada 5,14%.
 2. Pada tahun 2022, angka pengangguran menurun menjadi 4,82%, menunjukkan perbaikan dalam pasar tenaga kerja.
 3. Pada tahun 2023, angka pengangguran mengalami sedikit kenaikan menjadi 4,85%, menandakan adanya fluktuasi kecil dalam pasar tenaga kerja.
4. Pertumbuhan Ekonomi

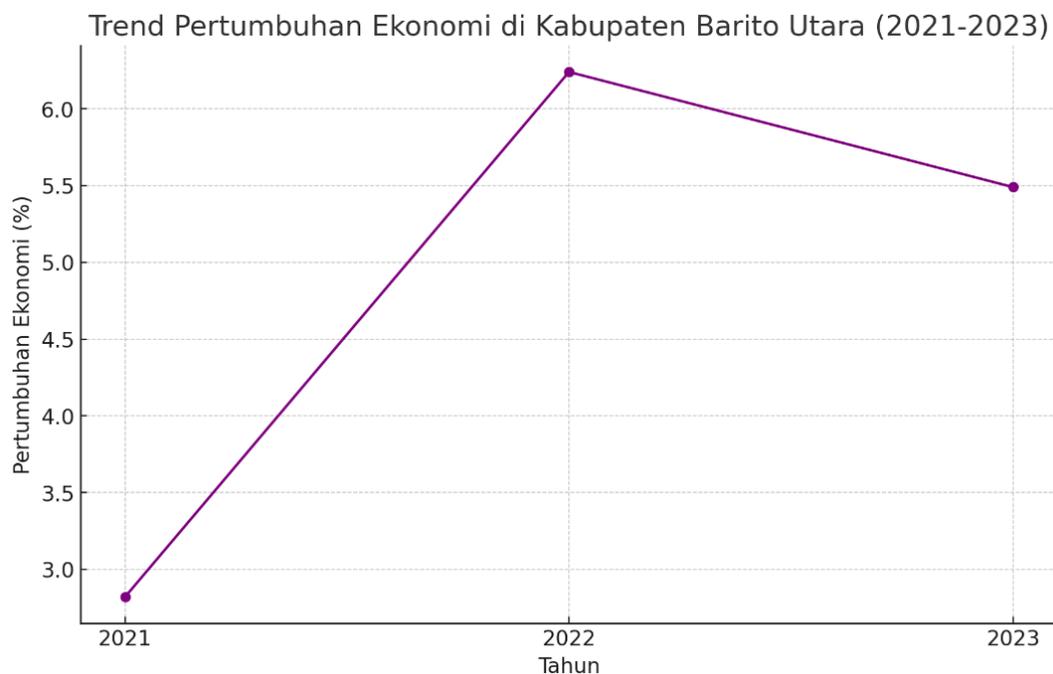
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Utara mengalami fluktuasi selama periode 2021 hingga 2023, menunjukkan dinamika ekonomi lokal yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 2,82%, yang kemudian meningkat signifikan menjadi 6,24% pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan menjadi 5,49%, yang masih menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat meskipun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada tahun 2022 dapat diatributkan kepada pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19, di mana berbagai sektor ekonomi mulai bangkit kembali setelah mengalami penurunan aktivitas. Inisiatif pemerintah dalam memacu investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, serta kebijakan yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dan sektor-sektor strategis seperti pertanian, pertambangan, dan pariwisata, mungkin telah berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ini.

Penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023, meskipun masih dalam kategori positif, mungkin mencerminkan adanya tantangan-tantangan baru, seperti ketidakpastian ekonomi global, perubahan harga komoditas, atau kendala dalam rantai pasokan. Penurunan ini juga dapat menjadi indikasi dari siklus

ekonomi alami, di mana fase pertumbuhan cepat diikuti oleh periode moderasi.

Pentingnya diversifikasi ekonomi menjadi sangat krusial dalam konteks ini, di mana pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan sektor-sektor baru yang berpotensi untuk pertumbuhan ekonomi, serta inovasi dan adaptasi dalam sektor-sektor yang sudah ada. Investasi dalam infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, serta penciptaan lingkungan bisnis yang kondusif dapat menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



Sumber : BPS Kabupaten Barito Utara

Grafik di atas menampilkan trend pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Utara dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 2,82%, yang kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi 6,24% pada tahun 2022, menandakan pemulihan ekonomi yang kuat. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan menjadi 5,49%, yang masih mencerminkan

pertumbuhan yang relatif kuat meskipun tidak sebesar tahun sebelumnya.

Perubahan ini menunjukkan dinamika ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Peningkatan pada tahun 2022 mungkin mencerminkan pemulihan pasca-pandemi dan keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi pertumbuhan ekonomi. Sementara penurunan pada tahun 2023 mungkin mengindikasikan adanya tantangan baru atau moderasi setelah fase pertumbuhan yang cepat.

5. Pendapatan Per Kapita

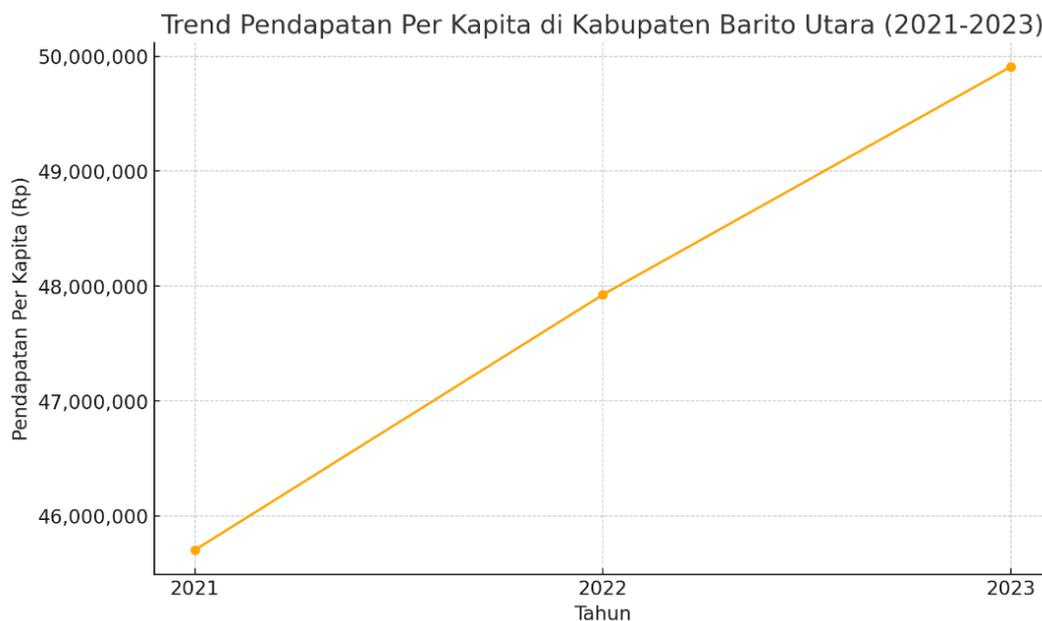
Pendapatan per kapita di Kabupaten Barito Utara menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2021 hingga 2023, mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pada tahun 2021, pendapatan per kapita tercatat sebesar Rp 45.703.809, yang kemudian meningkat menjadi Rp 47.924.307 pada tahun 2022, dan terus tumbuh hingga mencapai Rp 49.906.763 pada tahun 2023. Peningkatan ini dapat dianggap sebagai indikator positif dari efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi daerah dan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan standar hidup masyarakat.

Peningkatan pendapatan per kapita ini dapat diatributkan kepada berbagai faktor, termasuk diversifikasi ekonomi, pengembangan sektor-sektor produktif, investasi dalam infrastruktur yang memfasilitasi pertumbuhan bisnis dan perdagangan, serta peningkatan akses ke pendidikan dan pelatihan yang meningkatkan kualitas angkatan kerja. Khususnya, investasi di sektor-sektor seperti agrikultur, pertambangan, dan pariwisata mungkin telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan per kapita.

Namun, meskipun terjadi peningkatan pendapatan per kapita, penting untuk mempertimbangkan distribusi pendapatan dan

kesenjangan ekonomi di antara berbagai kelompok masyarakat. Peningkatan rata-rata pendapatan per kapita tidak selalu mencerminkan peningkatan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat, terutama jika pertumbuhan ekonomi tidak merata atau jika sebagian besar keuntungan ekonomi terkonsentrasi pada segmen tertentu dari populasi.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa peningkatan pendapatan per kapita berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas, penting bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan yang inklusif dan merata. Hal ini dapat mencakup program-program yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), inisiatif untuk meningkatkan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta strategi untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan.



Sumber : BPS Kabupaten Barito Utara

Grafik di atas menggambarkan trend pendapatan per kapita di Kabupaten Barito Utara dari tahun 2021 hingga 2023. Terlihat jelas terdapat peningkatan yang konsisten setiap tahunnya, dimulai dari Rp 45.703.809 pada tahun 2021, meningkat menjadi Rp 47.924.307 pada tahun 2022, dan mencapai Rp 49.906.763 pada tahun 2023.

Peningkatan ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam ekonomi Kabupaten Barito Utara yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Analisis tren Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Barito Utara dari tahun 2021 hingga 2023 mengungkapkan aspek penting dari distribusi ekonomi dan kesejahteraan sosial di wilayah tersebut. Ketimpangan pendapatan sering diukur menggunakan indeks seperti koefisien Gini, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan ketimpangan yang lebih besar.

Pada tahun 2021, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Barito Utara tercatat mengalami penurunan sebesar 2,27%, menunjukkan upaya yang berhasil dalam mengurangi disparitas pendapatan antar penduduk. Penurunan ini mungkin adalah hasil dari kebijakan redistribusi pendapatan, seperti peningkatan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta program bantuan sosial yang ditujukan untuk kelompok penduduk berpenghasilan rendah.

Namun, tren ini berubah pada tahun 2022 hingga 2023, di mana ketimpangan pendapatan meningkat sebesar 7,31%. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa, meskipun ekonomi mungkin berkembang, manfaat pertumbuhan ekonomi tersebut tidak didistribusikan secara merata di antara semua lapisan masyarakat. Peningkatan ketimpangan mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang tidak merata, perubahan dalam struktur pasar tenaga kerja, atau kebijakan publik yang kurang efektif dalam mengatasi disparitas pendapatan.

Analisis ketimpangan pendapatan menyoroti pentingnya mengimplementasikan kebijakan ekonomi dan sosial yang inklusif, yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tetapi juga pada distribusi kekayaan dan kesempatan yang adil. Untuk mengatasi peningkatan ketimpangan pendapatan, dapat dipertimbangkan strategi seperti reformasi pajak progresif,

investasi dalam pendidikan dan pelatihan kerja, serta pengembangan infrastruktur di daerah kurang berkembang untuk merangsang pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja.



Sumber : BPS Kabupaten Barito Utara

Grafik di atas menampilkan tren Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Barito Utara dari tahun 2021 hingga 2023, dari grafik, dapat dilihat:

1. Antara tahun 2021 dan 2022, terjadi penurunan dalam Ketimpangan Pendapatan sebesar 2,27%, yang menunjukkan upaya yang berhasil dalam mengurangi disparitas pendapatan di wilayah tersebut.
2. Namun, pada periode berikutnya, dari tahun 2022 ke 2023, terjadi peningkatan Ketimpangan Pendapatan sebesar 7,31%, menandakan bahwa disparitas pendapatan antara kelompok penduduk yang berbeda meningkat.

B. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pendidikan

a. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD.

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	92,41%	Dinas Pendidikan

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	219	Dinas Pendidikan
2.	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	4.845	Dinas Pendidikan
3.	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	4.261	Dinas Pendidikan
4.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	15	Dinas Pendidikan
5.	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	645	Dinas Pendidikan

6.	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	82	Dinas Pendidikan
7.	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	219	Dinas Pendidikan

b. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	84,20%	Dinas Pendidikan

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Jumlah SD = 177 Jumlah SMP =42	Dinas Pendidikan
2.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	13.744	Dinas Pendidikan
3.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	5.951	Dinas Pendidikan
4.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	4.105	Dinas Pendidikan
5.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	1.703	Dinas Pendidikan

6.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	6	Dinas Pendidikan
7.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	9	Dinas Pendidikan
8.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.972	Dinas Pendidikan
9.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	776	Dinas Pendidikan
10.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	2	Dinas Pendidikan
11.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	2	Dinas Pendidikan
12.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	312	Dinas Pendidikan
13.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	151	Dinas Pendidikan
14.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang	1.673	Dinas Pendidikan

	memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		
15.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	673	Dinas Pendidikan
16.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	177	Dinas Pendidikan
17.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	42	Dinas Pendidikan
18.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	247	Dinas Pendidikan

19.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	88	Dinas Pendidikan
-----	---	----	------------------

c. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	68,81%	Dinas Pendidikan

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Jumlah SD = 174 Jumlah SMP = 39	Dinas Pendidikan
2.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	13.744	Dinas Pendidikan

3.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	5.951	Dinas Pendidikan
4.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	13.098	Dinas Pendidikan
5.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	5.749	Dinas Pendidikan
6.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	6	Dinas Pendidikan
7.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	9	Dinas Pendidikan
8.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.972	Dinas Pendidikan
9.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	776	Dinas Pendidikan
10.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	2	Dinas Pendidikan
11.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada	2	Dinas Pendidikan

	jenjang sekolah menengah pertama		
12.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	312	Dinas Pendidikan
13.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	151	Dinas Pendidikan
14.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.673	Dinas Pendidikan
15.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	673	Dinas Pendidikan
16.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.	177	Dinas Pendidikan
17.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan	42	Dinas Pendidikan

	pelatihan calon kepala sekolah		
18.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	191	Dinas Pendidikan
19.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	75	Dinas Pendidikan

d. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1,21%	Dinas Pendidikan

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	6	Dinas Pendidikan

2.	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	396	Dinas Pendidikan
3.	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Dinas Pendidikan
4.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	3	Dinas Pendidikan
5.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	56	Dinas Pendidikan
6.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	56	Dinas Pendidikan
7.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	177	Dinas Pendidikan

8.	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	6	Dinas Pendidikan
----	---	---	------------------

2. Urusan Kesehatan

a. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,13%	RSUD Muara Teweh

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	1	RSUD Muara Teweh

b. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	Dinas Kesehatan

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	1	Dinas Kesehatan

c. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil.

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	93%	Dinas Kesehatan

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2.280	Dinas Kesehatan
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	375	Dinas Kesehatan

d. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	78%	Dinas Kesehatan

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2.300	Dinas Kesehatan
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	375	Dinas Kesehatan

e. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99%	Dinas Kesehatan

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2.754	Dinas Kesehatan

2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	339	Dinas Kesehatan
----	---	-----	-----------------

f. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80%	Dinas Kesehatan

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2.754	Dinas Kesehatan
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	375	Dinas Kesehatan

g. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	968	Dinas Kesehatan
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	84	Dinas Kesehatan

h. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	51	Dinas Kesehatan
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	17	Dinas Kesehatan

- i. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	77,50%	Dinas Kesehatan

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	17	Dinas Kesehatan
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	66	Dinas Kesehatan

- j. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	17	Dinas Kesehatan
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	17	Dinas Kesehatan

k. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	17	Dinas Kesehatan
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	17	Dinas Kesehatan

1. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	198	Dinas Kesehatan
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	17	Dinas Kesehatan

- m. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
-----	------------	-----------------	-------------

1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	17	Dinas Kesehatan
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	33	Dinas Kesehatan

n. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6	Dinas Kesehatan
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	33	Dinas Kesehatan

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	53,43%	Dinas PUPR

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	2.426	Dinas PUPR
2.	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	250	Dinas PUPR
3.	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	2.114,26	Dinas PUPR

4.	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	104.637,44	Dinas PUPR
5.	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak	Dinas PUPR
6.	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Tidak	Dinas PUPR
7.	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bangunan perkuatan tebing 5.807 m 2) Tanggul sungai = 73.356 m 3) Kanal bajir = 2.075 m 4) Pintu air/bendung pengendali banjir = 10 unit 5) Pompa banjir 1 Unit 6) Polder/Kolam Retensi = ...Unit 7) Breakwater = ... m 8) Seawall dan Bangunan 	Dinas PUPR

		pengaman pantai lainnya = ... m	
--	--	---------------------------------	--

- b. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	46%	Dinas PUPR

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	2.426	Dinas PUPR
2.	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	250	Dinas PUPR
3.	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi	0	Dinas PUPR

	erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		
4.	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	104.637,44	Dinas PUPR
5.	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak	Dinas PUPR
6.	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Tidak	Dinas PUPR
7.	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	1) Bangunan perkuatan tebing = 5.807 m 2) Tanggul sungai 73.356 m 3) Kanal bajir 2.075 m 4) Pintu air/bendung pengendali banjir 10 unit 5) Pompa banjir 1 Unit Kapasitas	Dinas PUPR

		6) Polder/Kolam Retensi ...Unit 7) Breakwater ... m 8) Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya 529 m dan lebar bangunan 8 meter, lebar dalam 11 m	
--	--	--	--

c. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	93,58%	Dinas PUPR

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	63,07%	Dinas PUPR
2.	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	38,14%	Dinas PUPR
3.	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	56,60%	Dinas PUPR

d. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	70,05%	Dinas PUPR

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPR
2.	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Tidak	Dinas PUPR
3.	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaran SPAM	Jumlah BUMD = 1 Jumlah UPTD = 0	Dinas PUPR
4.	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk	1	Dinas PUPR

	melakukan penyelenggaraan SPAM		
5.	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	0	Dinas PUPR

e. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	73,06%	Dinas PUPR

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	29.852	Dinas PUPR
2.	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	90	Dinas PUPR

3.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Jumlah rumah yg terakses unit pengolahan setempat = 29.852 unit Jumlah rumah yang terakses sambungan rumah untuk layanan SPALD-S dan SPALD-T = 29.942 unit	Dinas PUPR
4.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0	Dinas PUPR
5.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	Dinas PUPR
6.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	29.942	Dinas PUPR

7.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	63,11%	Dinas PUPR
8.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0%	Dinas PUPR
9.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	0%	Dinas PUPR
10.	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	63,11%	Dinas PUPR
11.	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0%	Dinas PUPR
12.	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0%	Dinas PUPR
13.	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	0%	Dinas PUPR
14.	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0%	Dinas PUPR

f. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100%	Dinas PUPR

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0%	Dinas PUPR
2.	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	102	Dinas PUPR
3.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	Dinas PUPR
4.	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Tidak	Dinas PUPR
5.	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0	Dinas PUPR
6.	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0	Dinas PUPR
7.	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	0	Dinas PUPR
8.	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	4	Dinas PUPR

g. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	56,73%	Dinas PUPR

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	758,14	Dinas PUPR
2.	Panjang jalan yang dibangun	12.200	Dinas PUPR
3.	Panjang jembatan yg dibangun	20	Dinas PUPR
4.	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	55.542,93	Dinas PUPR
5.	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	515,62	Dinas PUPR
6.	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	3.841,96	Dinas PUPR
7.	Panjang jembatan yang direhabilitasi	782,56	Dinas PUPR
8.	Panjang jalan yang dipelihara	457,38	Dinas PUPR

9.	Panjang jembatan yang dipelihara	1.958	Dinas PUPR
----	----------------------------------	-------	------------

h. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	40,74%	Dinas PUPR

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	10	Dinas PUPR
2.	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	13	Dinas PUPR
3.	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	3	Dinas PUPR
4.	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan	Ada	Dinas PUPR

	kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir		
5.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Tidak	Dinas PUPR
6.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tidak	Dinas PUPR
7.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak	Dinas PUPR
8.	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Tidak	Dinas PUPR

9.	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPR
10.	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Ada	Dinas PUPR
11.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ada	Dinas PUPR
12.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Ada	Dinas PUPR

13.	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPR
14.	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak	Dinas PUPR
15.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak	Dinas PUPR
16.	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak	Dinas PUPR
17.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak	Dinas PUPR

18.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	115	Dinas PUPR
19.	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PUPR
20.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	Dinas PUPR
21.	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	40	Dinas PUPR
22.	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Dinas PUPR
23.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUPR
24.	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUPR
25.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat,	0	Dinas PUPR

	klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		
--	---	--	--

- i. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

C. Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0%	Dinas PUPR

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

• Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	N/A	Dinas PRKPP

• Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	872	Dinas PRKPP
2.	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0	Dinas PRKPP
3.	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Jumlah RT =0 Jumlah KK = 0 Jumlah korban =0 jiwa	Dinas PRKPP
4.	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas PRKPP
5.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas PRKPP

6.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas PRKPP
7.	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Jumlah rumah = 0 unit Jumlah lokasi = 0	Dinas PRKPP
8.	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Jumlah RT = 0 Jumlah KK = 0 Jumlah korban = 0 jiwa	Dinas PRKPP
9.	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Jumlah luasan = 0 hektar Jumlah lokasi = 0	Dinas PRKPP

b. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	N/A	Dinas PRKPP

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PRKPP
2.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PRKPP
3.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PRKPP
4.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PRKPP
5.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PRKPP

6.	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	Dinas PRKPP
----	--	---	-------------

c. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	0,74%	Dinas PRKPP

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	375,954	Dinas PRKPP
2.	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	1.113	Dinas PRKPP
3.	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	2,81	Dinas PRKPP

d. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	4,22%	Dinas PRKPP

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Jumlah rumah di kab/kota	48.324	Dinas PRKPP
2.	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	1.113	Dinas PRKPP
3.	Jumlah rumah tidak layak huni	2.040	Dinas PRKPP
4.	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	Dinas PRKPP
5.	Rasio rumah dan KK	1,05%	Dinas PRKPP
6.	Jumlah rumah pembangunan baru	118	Dinas PRKPP

e. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0%	Dinas PRKPP

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	10	Dinas PRKPP

2.	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	40.708	Dinas PRKPP
3.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	0	Dinas PRKPP
4.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	0	Dinas PRKPP
5.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	Dinas PRKPP
6.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	0	Dinas PRKPP
7.	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	7	Dinas PRKPP
8.	Jumlah pengembang yang teregistrasi	3	Dinas PRKPP
9.	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Dinas PRKPP

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	93%	SATPOLPP

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	285	SATPOLPP
2.	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	196	SATPOLPP
3.	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	19	SATPOLPP
4.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	2	SATPOLPP
5.	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Tidak ada	SATPOLPP
6.	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	30	SATPOLPP

b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	84%	SATPOLPP

c. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	70,86%	BPBD

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	BPBD
2.	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	70,86%	BPBD

d. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	85,19%	BPBD

	kesiapsiagaan terhadap bencana		
--	--------------------------------	--	--

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100%	BPBD
2.	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100%	BPBD
3.	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	74,51%	BPBD
4.	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	73,51%	BPBD
5.	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	BPBD
6.	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	64,46%	BPBD

- e. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	BPBD

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%	BPBD
2.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	BPBD
3.	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	BPBD
4.	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	BPBD

f. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Dinas DAMKAR dan Penyelamatan

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	Jumlah layanan = 7 Jumlah Jenis layanan = 2	Dinas DAMKAR dan Penyelamatan
2.	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada	Dinas DAMKAR dan Penyelamatan
3.	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada	Dinas DAMKAR dan Penyelamatan

4.	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	1	Dinas DAMKAR dan Penyelamatan
5.	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	250	Dinas DAMKAR dan Penyelamatan
6.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	57	Dinas DAMKAR dan Penyelamatan
7.	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	22	Dinas DAMKAR dan Penyelamatan
8.	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	3	Dinas DAMKAR dan Penyelamatan

g. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit	Dinas DAMKAR dan Penyelamatan

6. Urusan Sosial

- a. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100%	Dinas SOSPMMD

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	910	Dinas SOSPMMD
2.	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah data Penyandang disabilitas 	Dinas SOSPMMD

	terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	<ul style="list-style-type: none"> terlantar = 434 • Jumlah data anak terlantar = 46 • Jumlah data lanjut usia terlantar = 340 • Jumlah data gepeng terlantar = 90 	
3.	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1	Dinas SOSPMD
4.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 434 • Jumlah anak terlantar = 46 • Jumlah lanjut usia terlantar = 340 • Jumlah gepeng = 90 	Dinas SOSPMD
5.	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2	Dinas SOSPMD
6.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 421 • Jumlah anak terlantar = 30 • Jumlah lanjut usia terlantar = 333 	Dinas SOSPMD

		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah gepeng = 90 	
7.	Jumlah rumah singgah /shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	18	Dinas SOSPMD
8.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 19 • Jumlah anak terlantar = 46 • Jumlah lanjut usia terlantar = 58 • Jumlah gepeng = 12 	Dinas SOSPMD
9.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 142 • Jumlah anak terlantar = 0 • Jumlah lanjut usia terlantar = 1 • Jumlah gepeng = 0 	Dinas SOSPMD
10.	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	0	Dinas SOSPMD
11.	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	0	Dinas SOSPMD
12.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 434 	Dinas SOSPMD

	terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah anak terlantar = 16 • Jumlah lanjut usia terlantar = 90 • Jumlah gepeng = 5 	
13.	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	Dinas SOSPMD
14.	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	0	Dinas SOSPMD
15.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 434 • Jumlah anak terlantar = 30 • Jumlah lanjut usia terlantar = 340 • Jumlah gepeng = 90 	Dinas SOSPMD
16.	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	10	Dinas SOSPMD
17.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 24 • Jumlah anak terlantar = 2 	Dinas SOSPMD

	mendapatkan dokumen kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah lanjut usia terlantar = 30 • Jumlah gepeng = 10 	
18.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 30 • Jumlah anak terlantar = 30 • Jumlah lanjut usia terlantar = 100 • Jumlah gepeng = 90 	Dinas SOSPMD
19.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 434 • Jumlah anak terlantar = 46 • Jumlah lanjut usia terlantar = 340 • Jumlah gepeng = 90 	Dinas SOSPMD
20.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 434 • Jumlah anak terlantar = 46 • Jumlah lanjut usia terlantar = 340 • Jumlah gepeng = 90 	Dinas SOSPMD

21.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 116 • Jumlah anak terlantar = 30 • Jumlah lanjut usia terlantar = 2 • Jumlah gepeng = 2 	Dinas SOSPMMD
-----	--	--	---------------

b. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

- Penjelasan IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	Dinas SOSPMMD

- Penjelasan IKK Output

No.	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	262	Dinas SOSPMMD
2.	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	262	Dinas SOSPMMD

3.	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	23	Dinas SOSPMMD
4.	Jumlah paket permakanaan khusus bagi kelompok rentan	47	Dinas SOSPMMD
5.	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Tidak Ada	Dinas SOSPMMD
6.	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	31	Dinas SOSPMMD

C. HASIL EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EKPPD) DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

a. Hasil Evaluasi EKPPD

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik, salah satunya adalah dengan melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) berdasarkan dari LPPD yang disusun.

Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut:

- a. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2022 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 yaitu dengan skor 2,60 kategori prestasi **Rendah**.
 - b. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2023 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 yaitu dengan skor 2,9616 kategori prestasi **Sedang**
- b. Opini Atas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil Audit atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara oleh Badan Pemeriksa Keuangan selama 5 Tahun terakhir didapatkan hasil opini sebagai berikut:

No.	Uraian	Opini Laporan Keuangan Daerah
1.	Opini BPK atas LPKD Tahun 2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2.	Opini BPK atas LPKD Tahun 2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3.	Opini BPK atas LPKD Tahun 2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4.	Opini BPK atas LPKD Tahun 2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5.	Opini BPK atas LPKD Tahun 2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2018 sampai dengan 2022 laporan keuangan Kabupaten Barito Utara dengan Opini BPK atas pemeriksaan LKPD Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dari opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah terlaksana secara baik sesuai dengan target yang ditetapkan dalam

RPJMD yaitu opini WTP. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen akan memperbaiki kinerja keuangan daerah sesuai dengan catatan yang telah dilakukan oleh BPK.

D. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

a. Target dan Realisasi Pendapatan

Target Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara sampai dengan setelah perubahan anggaran tahun 2023 sebesar Rp.1.917.108.048.047,00 dan realisasi sebesar Rp.1.711.446.057.765,89 atau sebesar 89,27 %. Ringkasan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2023 dapat dikemukakan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)	
	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN	1.917.108.048.047,00	1.711.446.057.765,89
PENDAPATAN ASLI DAERAH	102.512.679.816,00	291.346.132.569,92
Pendapatan Pajak Daerah	21.706.872.729,00	24.746.025.585,70
Pendapatan Retribusi Daerah	14.724.760.817,00	9.010.666.628,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.614.597.000,00	477.599.093,96
Lain-lain PAD yang Sah	54.466.449.270,00	257.111.841.262,26
PENDAPATAN TRANSFER	1.814.595.368.231,00	1.420.099.925.195,97
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.794.595.368.231,00	1.408.415.285.788,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.000.000.000,00	11.684.639.407,97
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0

b. Pengelolaan Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan kemampuan anggaran yang dimiliki telah melaksanakan beberapa program dan kebijakan pemerintahan dan pembangunan. Pada Tahun Anggaran 2023, sebagian besar realisasi penggunaan dana APBD untuk pelaksanaan beberapa program dan kegiatan.

Target Belanja Daerah untuk tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp2.260.190.126.453,00 dari target tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp.1.798.400.321.490,66 atau tercapai sebesar 79,57% dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
<u>BELANJA DAERAH</u>	2.260.190.126.453,00	1.798.400.321.490,66
BELANJA OPERASI	1.276.223.590.386,00	1.034.172.531.477,00
Belanja Pegawai	613.600.891.474,00	479.850.548.194,00
Belanja Barang dan Jasa	544.442.351.190,00	448.082.843.313,00
Belanja Subsidi	1.000.200.000,00	23.500.000,00
Belanja Hibah	114.544.813.322,00	103.660.824.376,00
Belanja Bantuan Sosial	2.635.334.400,00	2.554.815.594,00
BELANJA MODAL	753.125.573.302,00	610.503.203.101,42
Belanja Modal Tanah	29.342.043.504,00	1.933.195.040,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.104.964.736,00	104.790.363.650,13
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	154.171.568.332,00	143.960.010.457,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	453.984.745.810,00	356.782.780.554,29
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.457.250.920,00	1.990.437.200,00

Belanja Modal Aset Lainnya	1.065.000.000,00	1.046.416.200,00
BELANJA TAK TERDUGA		
Belanja Tak Terduga	558.660.410,00	0
BELANJA TRANSFER	230.282.302.355,00	153.724.586.912,24
Belanja Bagi Hasil	3.643.163.355,00	2.788.734.312,24
Belanja Bantuan Keuangan	226.639.139.000,00	150.935.852.600,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	465.273.128.137,00	465.273.128.136,85
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	465.273.128.137,00	465.273.128.136,85

E. INOVASI DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menyebutkan bahwa inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan sasaran untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempercepat upaya perwujudan sasaran tersebut, langkah inovatif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dilakukan berdasarkan aspek peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing Daerah. Selama pelaksanaan tugas pejabat Bupati Barito Utara, langkah inovatif yang dilakukan antara lain:

A. Aspek Pelayanan Publik

1. Intruksi Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang “Pembebasan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah CATIN Dalam Rangka Pencegahan Stunting” (BARISTA-CATIN).
2. Adanya Contact Center Pengaduan Bencana dengan Nomor Telepon 0519 2095625 Fax 0519 2095625 Email bpbdbarut2012@gmail.com Instagram [bpbdbarut](#) dan radio frekuensi 130.300 untuk mempermudah masyarakat melaporkan kejadian bencana di Kabupaten Barito Utara.
3. Inovasi dalam program pengelolaan Pendapatan Daerah diantaranya ; memanfaatkan teknologi Informasi dengan menggunakan beberapa aplikasi yaitu, My BPHTB, SIMPATDA, e SPTPD, My PBB, e SPPT PBB. Aplikasi ini menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan untuk mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah
4. Pelaksanaan Pos pelayanan Pembayaran Pajak Daerah Keliling
 - a. ke Kelurahan, ke RT dan ke rumah WP
 - b. ke Kantor Instansi Pemerintah
 - c. ke kantor Perusahaan

B. Aspek Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat

1. Pelaksanaan program GERIMIS MANTEL (Gerakan Hari Kamis Makan Telor)
2. Pemberian Dana Makanan Tambahan Kepada Keluarga Beresiko Stunting yang memiliki BADUTA.
3. Adanya MPA (Masyarakat Peduli Api) pada 40 Desa untuk memperkuat kemandirian dan kapasitas masyarakat dalam mendukung upaya pengendalian karhutla.
4. BATARA BERSINAR (Bersih Dari Narkoba)

C. Aspek Kepegawaian Daerah

1. Tersedianya Aplikasi Sistem layanan Admisnistrasi kepegawaian berbasis web (SILAD) Kepegawaian pada Pemkab Barut
2. Tersedianya Aplikasi SiADik pada Pemerintah Kab. Barut.
3. Tersedianya aplikasi E.kinerja Sidian & Siska pada Pemkab Barut